

IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH
(SIPD) KABUPATEN PROBOLINGGO

Sundari

sundarisetiyawan20@gmail.com

Sri Juni Woro Astuti

srijuniworoastuti@uwp.ac.id

Esa Wahyu Endarti

esawahyuendarti@uwp.ac.id

Universitas Wijaya Putra Surabaya

ABSTRACT

The study will more clearly analyze the implementation of SIPD in Probolinggo District and identify the factors that become obstacles in planning SIPD in Probolinggo District which is carried out using a descriptive qualitative analysis approach. The results showed that the implementation of the Regional Government Information System (SIPD) platform in Probolinggo Regency was going well. Probolinggo Regency is carrying out a massive implementation of the SIPD platform accompanied by using companion applications and regional internal applications; and the obstacles encountered include the SIPD application is still not able to meet the needs of information data collection so that it requires a companion application. The SIPD application does not yet provide a variety of data formats for printing reports, there are still gaps in data accuracy, and lack of outreach.

Keywords: *SIPD, e-planning, good governance*

ABSTRAK

Penelitian ini akan menganalisis implementasi SIPD di Kabupaten Probolinggo dan mengidentifikasi faktor - faktor yang menjadi kendala dalam perencanaan SIPD di Kabupaten Probolinggo yang dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan analisis kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi platform Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Kabupaten Probolinggo berjalan dengan baik. Kabupaten Probolinggo melaksanakan implementasi platform SIPD secara massif disertai dengan menggunakan aplikasi pendamping dan aplikasi internal daerah; dan kendala yang dihadapi diantaranya aplikasi SIPD masih belum mampu memenuhi kebutuhan pendataan informasi sehingga memerlukan aplikasi pendamping, aplikasi SIPD belum menyediakan berbagai variasi format data untuk cetak laporan, masih ada celah dalam akurasi data, dan kurangnya sosialisasi.

Kata kunci: *SIPD, e-planning, good governance*

PENDAHULUAN

Pembangunan di daerah harus didasarkan pada kapasitas dan kebutuhan tiap - tiap daerah. Oleh karena itu dibutuhkan perencanaan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan daerah, tepat sasaran, komprehensif, dan sistematis. Dalam proses perencanaan pembangunan masyarakat sebagai komunitas lokal harus dilibatkan karena masyarakatlah yang merasakan langsung dampak dari pembangunan tersebut. Pelaksanaan pembangunan di daerah harus dikoordinasikan dari tingkat bawah sampai pemerintahan pusat.

Pada tataran lebih dalam, di tingkat daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bappeda bertugas memantau dan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan daerah, kajian dan evaluasi kebijakan yang berkualitas. Hal ini akan sangat bermanfaat untuk perumusan kebijakan dan masukan bagi proses perencanaan pembangunan berikutnya dan bertanggung jawab kepada Gubernur/Bupati/walikota melalui Sekretaris Daerah. Badan ini mempunyai tugas pokok membantu Gubernur/Bupati/Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah badan inilah yang bertugas mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah. Dalam membantu mencapai tujuan tersebut maka Bappeda menggunakan sistem yang dapat mengoptimalkan kinerjanya agar dapat memberikan kualitas yang baik.

Secara teknis perencanaan pembangunan di tingkat daerah dilaksanakan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun

2017. Kemudian penyusunan perencanaan pembangunan dimulai dengan proses persiapan, penyusunan rancangan awal sampai akhir, pengadaaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang), forum konsultasi publik dan perangkat daerah, sampai pada penetapan peraturan daerah. Tahapan tersebut bersesuaian dengan fase dalam sistem perencanaan pembangunan terintegrasi atau yang sering disebut sebagai Integrated Development Planning (IDP) (Geyer, 2006). Fase IDP ini meliputi: fase 0 (persiapan), fase 1 (analisis), fase 2 (strategi), fase 3 (proyek), fase 4 (integrasi), dan terakhir fase 5 (persetujuan). Lebih jauh, proses perencanaan pembangunan juga dituntut sejalan dengan prinsip tata pemerintah yang baik (good governance).

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) berfungsi sebagai sebuah jejaring dalam pengumpulan data secara terpadu, real time dan online di pusat dan daerah dengan menggunakan teknologi informasi, sebagai dukungan dalam perencanaan program dan kegiatan serta evaluasi pembangunan daerah secara rasional, efektif dan efisien. Tentunya Sistem informasi tersebut dapat juga digunakan untuk mendukung integrasi pemanfaatan data terkait dengan perkembangan pembangunan pada masing - masing instansi pemerintah. Selain itu, fungsi SIPD sebagai media akuntabilitas publik yang memungkinkan masyarakat mengevaluasi kinerja pemerintah, mengevaluasi program-program pembangunan, dan sekaligus mengevaluasi capaian - capaian pembangunan.

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah atau disingkat SIPD merupakan sistem informasi yang memuat system perencanaan pembangunan daerah dan

sistem keuangan daerah, serta system pemerintahan daerah yang lain, termasuk sistem pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah selanjutnya disingkat SIPD adalah sistem informasi yang membantu penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi data dan informasi pembangunan daerah secara elektronik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah secara nasional. Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah bertujuan untuk meningkatkan kualitas proses perencanaan di daerah khususnya berkaitan dengan input usulan program dan kegiatan yang akan diakomodir dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dengan adanya SIPD diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses perencanaan pembangunan daerah. SIPD sangat dibutuhkan dalam rangka mewujudkan keterpaduan program dan kegiatan nasional SIPD dijadikan alat untuk mendukung koordinasi teknis antara Pemerintah Pusat melalui Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri dengan seluruh daerah. Oleh karena itu, SIPD merupakan sarana dalam mendukung keberhasilan perencanaan pembangunan daerah dengan berdasarkan data dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

TINJAUAN TEORETIS

E-government didefinisikan sebagai upaya pemanfaatan dan pendayagunaan telematika untuk meningkatkan efisiensi dan cost-effective pemerintahan, memberikan berbagai jasa pelayanan kepada masyarakat secara lebih baik, menyediakan akses informasi kepada publik secara lebih luas, dan menjadikan penyelenggaraan pemerintahan lebih bertanggung jawab (accountable) serta transparan kepada masyarakat. World Bank mendefinisikan e-Government sebagai penggunaan/pemanfaatan teknologi informasi oleh lembaga pemerintah untuk

meningkatkan pelayanan pada masyarakat, pelaku bisnis, dan sekaligus memfasilitasi kerja sama dengan lembaga pemerintah lainnya.

Lebih lanjut, e-Government harus diarahkan pada pemberdayaan masyarakat melalui akses yang luas terhadap informasi yang tersedia. Dengan demikian e-Government memiliki cakupan atau ruang lingkup yang cukup luas, bukan saja meliputi seluruh unit dalam suatu organisasi pemerintah tetapi juga mencakup mitra kerjanya (stakeholders) yang terdiri dari karyawan/pegawai lembaga pemerintah, anggota masyarakat, pelaku bisnis, lembaga pemerintah lainnya, pemasok/pembekal alat-alat kantor dan sebagainya.

Tjokroaminoto dalam Usman (2008) menuturkan perencanaan merupakan proses yang menyiapkan kegiatan secara sistematis dan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Lebih jauh Usman (2008) juga berpendapat perencanaan adalah perhitungan dan penentuan mengenai sesuatu yang akan dijalankan untuk mencapai tujuan tertentu, siapa yang melakukan, bilamana, dimana, dan bagaimana cara melakukannya.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perencanaan terdiri atas analisis, kebijakan dan rancangan. Kemudian ciri-ciri pokok perencanaan umum yakni mencakup serangkaian tindakan berurutan yang ditujukan pada pemecahan permasalahan yang akan datang yang mencakup suatu proses yang berurutan yang dapat diwujudkan sebagai konsep dalam sejumlah tahapan. Perencanaan mencakup banyak variasi antara lain: Misi atau Maksud (Mission atau Purpose) Misi entitas bisnis biasanya memproduksi dan/atau mendistribusikan barang atau jasa ekonomis. Tujuan merupakan hasil akhir dimana aktivitas atau kegiatan organisasi diarahkan atau ditujukan untuk rencana organisasi yang paling dasar. Proses perencanaan dimulai dengan mempelajari

lingkungan eksternal organisasi, kemudian dilanjutkan dengan misi, turun lagi ke tujuan organisasi.

Muara dari seluruh isi dan substansi dokumen perencanaan mulai dari RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA-SKPD dan RENJA-SKPD adalah penganggaran (RAPBD/APBD). Dengan mencermati alur dokumen perencanaan nampak dengan jelas keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran. Satu hal yang perlu dicatat bahwa penyusunan dokumen-dokumen perencanaan seperti diuraikan sebelumnya adalah mengacu pada lima proses perencanaan sebagaimana dalam UU SPPN. Proses perencanaan top-down dan bottom-up dimaksudkan sebagai perumusan perencanaan yang dimulai dari level atas kemudian dijabarkan ke level bawah. Sedangkan perencanaan bottom-up adalah perumusan perencanaan yang dilakukan dari bawah kemudian disesuaikan dengan perencanaan dari atas. Top-down dapat dicermati pada struktur pemerintahan (pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta pemerintah kecamatan dan Desa) dan organisasi/lembaga (Kementerian dan Lembaga serta SKPD).

Proses dan mekanisme penyusunan perencanaan daerah mulai dari RKPD, RPJMD, RKPD, Renstra-SKPD, dan Renja-SKPD telah diatur oleh UU dan Peraturan lainnya termasuk peraturan terkini tentang tahapan penyusunan dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah yaitu Permendagri No 54 tahun 2010. Proses dan mekanisme yang diuraikan khususnya untuk RPJMD menggunakan pendekatan praktis dan operasional. Pertama, menganalisis dan mencermati laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah periode sebelumnya (t-1). Terdapat sejumlah informasi penting yang dapat diperoleh dalam laporan pertanggungjawaban pemerintah termasuk diantaranya mengetahui seberapa jauh keberhasilan atau

kegagalan penyelenggaraan dan pembangunan pada tahun sebelumnya. Termasuk pula mengetahui seberapa besar dampak kebijakan penganggaran terhadap keberhasilan program dan kegiatan prioritas yang telah ditetapkan, mengetahui posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, serta perubahan posisi keuangan pemerintah daerah, apakah mengalami peningkatan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilaksanakan.

Dalam SE Mendagri 050/2020/JS, hasil analisis ini disebut sebagai inventarisasi data dan informasi. Kedua, pemahaman yang lebih mendalam terhadap penyelenggaraan dan pemerintahan serta keuangan daerah akan memberi informasi penting terhadap arah kebijakan perencanaan tahun berikutnya, yakni strategi pembangunan daerah, arah kebijakan umum serta arah kebijakan keuangan daerah. Informasi inilah akan dituangkan ke dalam sistem informasi perencanaan (SIP) dan sistem informasi Keuangan Daerah (SIKD). Ketiga, hasil review penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan disesuaikan dengan visi dan misi kepala daerah pada periode perencanaan sehingga melahirkan sebuah benang merah yang akan menjadi arahan kebijakan kepada SKPD.

Setelah dokumen RPJMD ditetapkan melalui peraturan daerah, maka dokumen RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen RKPD. Tahapan yang dilakukan adalah: (i) menyusun rancangan awal RKPD, (ii) Rancangan awal RKPD menjadi acuan dalam menyusun Renja SKPD, (iii) Rancangan RKPD setelah verifikasi dengan Renja, (iv) Musrenbang RKPD, (v) RKPD.

Proses dan mekanisme penyusunan rancangan Renstra SKPD pada dasarnya memiliki unsur kesamaan dalam proses dan mekanisme penyusunan rancangan awal

RPJMD yakni menemukan benang merah antara visi, misi Kepala Daerah terpilih dengan hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada periode sebelumnya. Pertama, rancangan Renstra SKPD pada dasarnya diturunkan dari benang merah yang telah ditemukan antara visi dan misi kepala daerah terpilih dan hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dan keuangan daerah dari tahun sebelumnya. Kedua, konsistensi isi dan substansi rancangan Renstra SKPD dan rancangan awal RPJMD harus selalu tetap terjaga.

Oleh sebab itu, rancangan Renstra SKPD diturunkan dari rancangan awal RPJMD yang disusun oleh Bappeda. Ketiga, rumusan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan dan program-program indikatif dan kegiatan-kegiatan SKPD ditampung dalam dokumen rancangan Renstra SKPD dan selanjutnya disampaikan kepada Kepala Bappeda sebagai masukan utama dalam penyusunan rancangan RPJMD. Isi dan muatan yang terdapat didalam rancangan Renstra tetap memperhatikan Renstra SKPD periode sebelumnya, rancangan awal RPJMD, capaian keberhasilan dan permasalahan dalam periode sebelumnya, serta tugas dan fungsi pokok SKPD. Keempat, rancangan Renstra SKPD disempurnakan kembali setelah RPJMD ditetapkan oleh Peraturan Daerah (setelah mendapat persetujuan dari DPRD). Dengan demikian, dokumen RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra SKPD dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala SKPD. Sedapat mungkin diharapkan rancangan Renstra tidak mengalami perubahan drastis.

Langkah-langkah dalam menyusun Renstra SKPD berdasarkan Permendagri 54 Tahun 2010 lebih rinci dibandingkan dengan peraturan sebelumnya, sehingga penjelasan yang diuraikan sebelumnya secara substansi tidak mempunyai perbedaan arti, namun mekanismenya sedikit mengalami

perbedaan. Setelah RPJMD ditetapkan melalui peraturan daerah, maka rancangan renstra disempurnakan untuk kemudian menjadi rancangan akhir renstra SKPD. Setelah verifikasi kesesuaiannya kemudian selanjutnya ditetapkanlah Renstra oleh Kepala SKPD.

METODE PENELITIAN

Ditinjau dari jenis datanya pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data. Jenis penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan pada penelitian ini dimaksudkan tentang Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Probolinggo Maka proses penelitian kualitatif dimulai dengan menyusun asumsi dasar dan aturan berpikir yang akan digunakan dalam penelitian.

Fokus dan dimensi penelitian ini dilaksanakan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Probolinggo pada Tahun 2021. Kemudian identifikasi variabel atau fokus penelitian dalam penelitian ini yang berjudul Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bappeda Kabupaten Probolinggo berfokus pada perencanaan di SIPD. Selain itu, penelitian juga mengidentifikasi proses perencanaan melalui bottom up dan politik yang ditelaah secara mendalam. Selanjutnya Dimensinya harusnya

1. perencanaan; menggunakan SIPD disertai aplikasi pendamping;
2. penganggaran; menggunakan aplikasi SIPD disertai aplikasi pendamping;
3. penatausahaan; menggunakan SIPD penuh, menggunakan aplikasi SIPD disertai aplikasi pendamping, dan menggunakan aplikasi sendiri;

pelaporan/pertanggungjawaban; menggunakan aplikasi SIPD disertai aplikasi pendamping, dan menggunakan aplikasi sendiri.

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Probolinggo pada Tahun 2021. Penentuan lokasi penelitian berdasarkan pada pelayanan yang menerapkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bappeda Kabupaten Probolinggo. Objek dalam penelitian ini merupakan pihak – pihak yang memahami tentang proses pemilahan data, input data, dan laporan mengenai SIPD Bappeda Kabupaten Probolinggo. Pihak – pihak tersebut diantaranya pejabat di Bappeda Kabupaten Probolinggo seklaigus pusat serta petugas SIPD.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dengan lebih banyak bersifat uraian dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi, serta studi literatur. Data yang telah diperoleh akan dianalisis secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif. Menurut Patton (Moleong, 2001), analisis data adalah “proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan uraian dasar”. Definisi tersebut memberikan gambaran tentang betapa pentingnya kedudukan analisis data dilihat dari segi tujuan penelitian. Prinsip pokok penelitian kualitatif adalah menemukan teori dari data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kabupaten Probolinggo (Studi Kasus E-Planning dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Terintegrasi) bahwa secara simultan OPD di Kabupaten Probolinggo telah menerapkan SIPD dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan mayoritas responden menilai dengan sepakat atau “setuju” bahwa

implementasi SIPD Kabupaten Probolinggo dinyatakan berjalan dengan baik.

Paparan hasil penelitian tersebut sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya mengenai implementasi SIPD. Winarno, Kusnadi, dan Afriliana (2019) melakukan penelitian bertajuk “Implementasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah di Kabupaten Tangerang” melakukan penelitian dengan pendekatan kualitatif. Penelitian tersebut mendeskripsikan bahwa dengan adanya pelatihan tersebut, maka para operator Sistem Informasi Pembangunan Daerah di Dinas-Dinas dan Kecamatan-Kecamatan di Kabupaten Tangerang telah dapat mengoperasikan sistem dan menginputkan data masing-masing ke dalam sistem, sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Dengan demikian, maka data pembangunan di Kabupaten Tangerang dapat disediakan dan dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan pembangunan di tingkat nasional maupun daerah.

Sejalan dengan itu, Nasution dan Nurwani (2021) melakukan kajian bertajuk “Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan” yang didukung dengan pendekatan deskriptif. Berdasarkan informasi yang didapatkan Sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) berfungsi untuk memuat system perencanaan pembangunan daerah dan sistem keuangan daerah, serta system pemerintahan daerah yang lain, termasuk sistem pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah.

Dalam implementasi SIPD di Kabupaten Probolinggo juga didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang telah melalui pendampingan dan pendidikan berupa bimbingan teknis (bimtek) yang mana khusus diberikan untuk petugas operator SIPD. Hal ini tercantum dalam Surat Keputusan Bupati Probolinggo Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim

Pelaksana Kegiatan Pendampingan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2021.

SIMPULAN

Implementasi platform Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Kabupaten Probolinggo berjalan dengan baik. Kabupaten Probolinggo melaksanakan implementasi platform SIPD secara massif disertai dengan menggunakan aplikasi pendamping dan aplikasi internal daerah. Kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi SIPD di Kabupaten Probolinggo diantaranya aplikasi SIPD masih belum mampu memenuhi kebutuhan pendataan informasi sehingga memerlukan aplikasi pendamping, aplikasi SIPD belum menyediakan berbagai variasi format data untuk cetak laporan, masih ada celah dalam akurasi data, dan kurangnya sosialisasi.

DAFTAR PUSTAKA

Creswell. J.W. 2009. *Research Design Pendekatan Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Dwiyanto, A. 2006. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. UGM-Press. Yogyakarta.

Elysia, Vita, Ake Wihadanto, Sumartono. 2017. Implementasi E-government untuk Mendorong Pelayanan Publik Yang Terintegrasi di Indonesia. *Jurnal Optimalisasi Peran Sains Dan Teknologi Untuk Mewujudkan Smart City*.

Fitri, Rahmi, dkk. 2017. Pengembangan Sistem Informasi Desa Untuk Menuju Tata Kelola Desa Yang Baik (Good Governance) Berbasis TIK. *Jurnal Positif*, Volume 3, No. 2, 2017.

Gultom, Depitasari. 2016. Upaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Dalam Meningkatkan Koordinasi Perencanaan

Pembangunan Daerah (Studi Pada Bappeda Provinsi Jawa Timur). *Jurnalmahasiswa.unesa.ac.id*.

Hidayat, Syarif dan Noor Sowandi. 2018. Pengembangan Sistem Informasi Desa Terintegrasi. *Jurnal Global*, Volume IV. No 2/ Juli/2018.

H.M. Jogiyanto. 2005. *Analisa dan Desain Sistem Informasi: Pendekatan Terstruktur Teori Dan Praktik Aplikasi Bisnis*. Andi Offset. Yogyakarta.

Husaini, Usman. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial*. Bumi Aksara. Jakarta.

Kumorotomo, W. dan Margono, S.A. 2009. *Sistem Informasi Manajemen*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.

Laudon, Kenneth C & Laudon, Jane P. 2005. *Management Information Systems: Managing the Digital Firm Eight Edition*. Prentice Hall. Boston.

Mahendra, G. Katon., dan Pribadi, U. 2016. Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Pengaduan Masyarakat berbasis e-Government (Studi Kasus: UPIK Yogyakarta). *Journal of Governance and Public Policy*, Vol.1 (1), p 54-75.

Mardikanto, Totok dkk 2012. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Alfabeta. Bandung.

Moleong, L.J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.

Nadya, Cita dkk, 2020. Implementasi Sistem Pemerintahan Daerah Kota Manado (Studi di Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Manado). *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi.

Novita, Dien. 2014. Faktor-Faktor Penghambat Pengembangan E-Government: Studi Kasus Pemerintah Kota Palembang, Sumatera Selatan. *Jurnal Eksplora Informatika* 4 (1).

Permendagri No.77 Tahun 2020 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

Sandiasa, Gede dan Putu Agustana, 2017. Reformasi Administrasi dan Birokrasi Pemerintahan Daerah Dalam Meningkatkan Kualitas Layanan Publik di Daerah. *Public Inspiration Jurnal Administrasi Publik*. Warmadewa.

Singh, Y.K. 2006. *Fundamental of Research Methodology and Statistics*. New Age Internastional (P) Ltd. New Delhi.

Soendjojo, H. 2005. Implementasi E-Government Pada sejumlah pemerintah Daerah. Konferensi Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi, ITB.

Sudianing, Ni Ketut dan Ketut Agus Seputra, 2019. Peran Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Dalam Menunjang Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah. *Locus Majalah Ilmiah FISIP* Vol 11.

Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Widodo, J. 2009. *Analisa Kebijakan Publik*. Banyumedia Publishing. Jakarta.

Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Media Pressindo. Jakarta.

Winarno, B. 2012. *Kebijakan Publik*. CAPS. Yogyakarta.